

PARADIGMA PEMBANGUNAN DI PERSIMPANGAN JALAN¹

Oleh: M. Dawam Rahardjo²

I.

Pada perputaran memasuki dasawarsa '90-an, bersamaan dengan kejatuhan rezim sosialis di seluruh dunia, Francis Fukuyama mengumumkan sebuah tesis mula-mula melalui sebuah artikel panjang di jurnal "*National Interest*" (1989) kemudian dalam bukunya "*End of History and the Last Man*" (1992) yang mengatakan bahwa puncak evolusi pemikiran manusia di bidang politik adalah Demokrasi Liberal dan di bidang ekonomi adalah kapitalisme pasar bebas (*laissez faire political-economy*). Tak lama kemudian lahirlah rumusan Washington Consensus yang kemudian disebut sebagai paham Neo-Liberalisme yang menjadi dasar kebijaksanaan International Monetary Fund (IMF). Pandangan ini disebut oleh George Soros sebagai aliran Fundamentalisme-Pasar, karena kembali pada pandangan fundamental teori Neo-Klasik, tapi kini didukung oleh politik kekerasan yang berujud imperialisme.

Pada waktu itu juga, terjadi perubahan dalam perimbangan kekuatan politik dunia. AS tampil sebagai negara adidaya tunggal, baik di bidang ekonomi maupun politik-militer. Namun sebenarnya kekuatan AS itu telah disaingi oleh kekuatan yang baru muncul (*emerging forces*), yaitu kekuatan ekonomi dan politik Eropa Bersatu atau Uni Eropa yang telah menggabung kekuatan negara sosialis Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Rumania, Bulgaria dan Yugoslavia.

Dampak perubahan itu sesungguhnya paling nampak di dua negara *adidaya* sosialis, yaitu Uni Soviet dan Cina. Di Uni Soviet timbul agenda *glasnotz*, atau pembaharuan politik dan *perestroika*, pembaharuan di bidang ekonomi yang dipelopori oleh Michael Gorbachev. Namun dalam kenyataan, yang berkembang di Uni Soviet hanyalah pembaharuan politik yang mengarah pada proses demokratisasi. Tapi di bidang ekonomi, walaupun terjadi juga perubahan, sifatnya marjinal, karena kesulitan penyesuaian diri sosialisme ekonomi dengan kapitalisme yang berakibat, bahkan terjadi kemerosotan pertumbuhan ekonomi. Sebaiknya di Cina proses demokratisasi tidak terjadi, Tapi di bidang ekonomi, Cina membuka perekonomiannya ke dan mengintegrasikannya ke dalam pasar dunia dengan menjadi anggota WTO, sehingga pertumbuhan ekonomi Cina meningkat tinggi karena perdagangan internasionalnya, terutama dengan AS, sehingga cadangan devisanya membesar, mencapai US\$ 1.300 milyar yang menjadikan Cina sebagai raksasa baru perekonomian dunia. Perubahan serupa terjadi di India dan Brazilia sehingga dua negara itu diramalkan menjadi anggota baru kekuatan raksasa perekonomian dunia. Pada awal abad 21, AS sebagai kekuatan adidaya tunggal telah diimbangi, paling tidak di bidang ekonomi, oleh beberapa

¹ Makalah disampaikan pada acara seminar Dies Natalis Institute Pertanian (IPB) Bogor ke-45, dengan tema "Konvergensi Nasional untuk Kemandirian Pangan dan Energi Menuju Kedaulatan Bangsa", di Bogor, tanggal 30 Oktober 2008

² Adalah Ketua Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Jakarta.

kawasan ekonomi baru dunia. Tapi di bidang politik, AS meningkatkan politik imperialismenya yang menelan biaya sangat besar sehingga menimbulkan defisit dalam APBN-nya yang ditutup dengan utang domestik, dengan menerbitkan obligasi negara.

Pada akhir dasawarna 90-an itu Indonesia juga dilanda krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis politik. Dalam rangka mengatasi krisis ekonomi,-- berbeda dengan Malaysia yang walaupun ikut dilanda krisis keuangan menyusul Thailand, menolak bantuan IMF--, Indonesia meminta pertolongan IMF. Malaysia yang memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat telah berkembang menjadi negara industri baru di Asia Tenggara mengikuti Singapore, Taiwan dan Korea Selatan, sedangkan Indonesia masih belum sepenuhnya terlepas dari krisis ekonomi, bahkan terjebak dalam krisis baru, yaitu krisis energi, krisis pangan dan krisis lingkungan hidup dan kemungkinan krisis keuangan ulangan, yang menjadi tantangan baru. Karena masih bergantung pada bantuan IMF itulah maka Indonesia harus mengikuti paradigma ekonomi baru yang diciptakan oleh Konsensus Washington (1998), lebih populer disebut Neo-Liberalisme yang pada intinya adalah paham pasar bebas (*laissez faire*) dan globalisasi ekonomi.

Walaupun tesis Pungkasan Sejarah (*the end of History*) itu memang cukup nyata dilihat dari gelombang globalisasi, yaitu semua negara di dunia akan mengalami proses demokratisasi politik dan liberalisasi ekonomi, namun di tingkat wacana, tesis itu dibantah, sedikitnya oleh tiga orang pemikir dunia. Pertama Ralph Milliband yang mengatakan, bahwa Demokrasi Liberal dan Kapitalisme itu tidak kompatibel, karena kapitalisme merupakan landasan yang rapuh bagi demokrasi. Jika demokrasi itu dilandasi oleh egaliterianisme, maka kapitalisme menimbulkan ketidak-merataan dan konsentrasi serta dengan meminjam istilah ekonom Marxis Mesir, Samir Amin mengikuti tradisi Prebishian dari Amerika Latin, pertukaran yang tidak-seimbang (*unequal exchange*). Dia juga mengatakan bahwa paradigma baru adalah Sosialisme Demokratis atau Sosial-Demokrasi. Sejalan dengan pandangan itu, Anthony Giddens dalam tesisnya mengenai Jalan Ketiga (*Third Way*) (1998) mengatakan bahwa dunia sekarang mempunyai dua pilihan, yaitu Neo-Liberalisme yang dipelopori oleh Margareth Thecher dari Inggris dan Ronald Reagan dari AS dan Sosial-Demokrasi Baru (*New Social Demokrasi*) yang dipelopori oleh Tony Blair dari Inggris dan Bill Clinton dari AS.

Pada waktu yang bersamaan, pemilihan umum di 10 negara di Eropa Barat diberitakan dalam majalah "*The Economist*" dari Inggris, dimenangkan oleh partai-partai sosialis dan sosial-demokrat di 9 negara. Sementara itu, Johan Galtung meramalkan bahwa dalam tempo dua dasawarsa, ekonomi AS akan mengalami keruntuhan, belum bisa dipastikan apakah krisis keuangan AS pada Oktober yang ditandai oleh kebangkrutan lembaga-lembaga keuangan terbesar dunia dari AS itu merupakan pertanda bagi kebangkrutan kapitalisme AS. Juga masih menjadi pertanyaan, apakah Indonesia akan terkena efek domino krisis keuangan itu mengingat di satu pihak fundamental ekonomi Indonesia dinilai kalangan pengamat dan Pemerintah sendiri, masih cukup kuat, namun Indonesia menghadapi *tripple-crisis*, yaitu krisis energi, krisis ketahanan pangan dan krisis lingkungan.

Dalam menghadapi hegemoni Neo-Liberalisme itu perlu juga diperhatikan gejala baru yang timbul di kawasan Amerika Latin, yaitu lahirnya kekuatan politik yang menentang Globalisasi Neo-liberal yang diidentikkan dengan Imperialisme Baru (*Neo-Imperialism*) itu, yaitu pertama di Kuba, yang diikuti oleh Venezuela, Bolivia, Argentina dan baru-baru ini Cili yang memilih mantan pastor yang menganut Teologi

Pembebasan sebagai presiden dan mencanangkan Neo-sosialisme. Ciri utama dari kecenderungan ekonomi di negara-negara itu adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan ekonomi nasional melawan kedaulatan pasar global. Namun masih menjadi tanda-tanya, apakah kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan baru di negara-negara itu akan berhasil membangkitkan kekuatan ekonomi dan politik baru yang memperkuat proses demokratisasi ekonomi dan politik dunia.

Dalam menghadapi pilihan yang diajukan oleh Anthony Giddens. Pemikir sosial Inggris itu sendiri, menawarkan jalan ketiga yang mengatasi dikotomi kiri-kanan (*beyond right and left*). Kita di Indonesia tidak perlu mengikuti pilihan Giddens, karena konsep Jalan Ketiga di dasarkan pada tradisi Eropa-Amerika, sedangkan Indonesia punya sejarahnya sendiri. Namun, pilihan yang mengatasi kiri-kanan itu sebenarnya sudah ada dalam tradisi pemikiran ekonomi-politik dan pembangunan Indonesia. Orientasi itu sudah tertulis dalam konstitusi Indonesia dalam pasal-pasal ekonominya, yang intinya adalah Ekonomi-politik Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare political economy*) yang disebut juga dari sudut epistemologi sebagai Demokrasi Ekonomi, yang berakar pada ontologi perekonomian Indonesia.

Paradigma pembangunan itu esensinya adalah, pertama dari segi ontologi, perekonomian Indonesia adalah warisan dari perekonomian kolonial yang dualistis yang terdiri dari lapis kekuatan ekonomi kapital-kolonial di atas dan lapis kekuatan ekonomi rakyat di bawah. Kedua, dari segi epistemologi, perekonomian pasca kolonial perlu didekati dengan prinsip demokrasi ekonomi yang mendampingi demokrasi politik yang ditopang dengan dua prinsip, yaitu partisipasi rakyat dan emansipasi rakyat dari segala bentuk dominasi dan ketergantungan, sehingga menjadi perekonomian yang mandiri. Ketiga dari segi aksiologi, pembangunan Indonesia menuju kepada masyarakat adil dan makmur yang disebut juga kesejahteraan sosial.

Paradigma itu memang sudah kita miliki dan bahkan dijadikan orientasi pembangunan, selama lebih dari setengah abad. Masalahnya adalah, dalam perjalanannya perekonomian Indonesia sering menyimpang dari jalan lurus, karena paradigmanya bergerak ke kiri dan ke kanan sebagai bandul jam, yang sebenarnya sejalan dengan dan karena itu dipengaruhi oleh paradigma ekonomi-politik dunia yang terdiri dari dua kutub, kapitalisme dan sosialisme, keduanya adalah paradigma yang lahir dari sejarah Eropa-Barat yang bercorak imperialis. Dalam menghadapi dua kubu itu, para pemikir ekonomi Indonesia sering merasa berada di persimpangan jalan, kiri dan kanan. Di masa pasca kolonial, memang telah terjadi perkembangan dan pergeseran paradigmatis yang kini harus kita evaluasi. Karena itu maka ke depan, kita perlu melakukan penemuan kembali (*rediscovery*) berdasarkan wacana ontologis yang berubah, karena perkembangan dan perubahan. Wacana ontologi terakhir menemukan bahwa perekonomian Indonesia menghadapi krisis ekonomi multi-dimensi sebagai akibat dari ketergantungan ekonomi. Karena itu maka Indonesia perlu mengatasi ketergantungan itu dengan membangun perekonomian mandiri yang dinamis, mengikuti perkembangan.

II.

Indonesia sendiri, pada awal abad 21, selain terbawa dalam arus globalisasi Neo-liberal karena ketergantungannya dari segi keuangan dan permodalannya pada IMF, juga telah mengalami proses demokratisasi politik sejak 1998. Dalam proses itu, pada tahun 2002, MPR telah melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dan menghasilkan UUD 2002 dengan perubahan dan penambahan pasal-pasal. Perubahan yang menonjol adalah pembatasan masa jabatan presiden-wakil presiden, pemilihan presiden-wakil presiden langsung setiap lima tahun, penghapusan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, hapusnya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan sejalan dengan itu, maka presiden dan wakil presiden bukan lagi mandataris MPR yang mengemban misi melaksanakan GBHN. Dengan tiadanya GBHN, sulit diketahui, paradigma pembangunan apa yang diikuti oleh pemerintah dan rakyat. Dalam UUD 2002 memang masih tercantum pasal-pasal ekonomi, namun pasal-pasal itu cenderung untuk tidak diikuti atau dijadikan acuan dalam paradigma pembangunan maupun kebijaksanaan ekonomi. Sebabnya, setiap pergantian presiden akan diikuti dengan pergantian kebijaksanaan pembangunan. Jika sebelum amandemen, GBHN mencerminkan paradigma pembangunan yang diikuti, sekarang yang menjadi acuan adalah platform politik presiden terpilih yang mengusulkan program-programnya dan secara informal dan personal melemparkan janji-janji politik yang tidak mengikat.

Dalam reformasi itu, di satu pihak pembangunan mengalami politisasi yang dimainkan oleh tokoh-tokoh dan partai-partai politik, dan di lain pihak, politik dan kekuasaan mengalami pasarisasi (*marketization*) dalam arti akan dijual di pasar bebas dan ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran komoditas politik. Di sini, faktor kepemilikan dan penguasaan dana akan bermain kuat dan menentukan siapa dan partai apa yang mendapat suara lebih banyak dari yang lain, sebagaimana berlaku di AS. Dan dalam pemerintahan, lobi-lobi ekonomi memainkan peran yang kuat yang mempengaruhi keputusan politik. Maka politik di Indonesia tidak mengikuti aturan demokrasi, melainkan dikuasai oleh plutokrasi.

Di masa dimana GBHN masih tercantum dalam konstitusi, berbagai lembaga, organisasi dan perorangan dalam masyarakat warga (*civil society*), ramai-ramai berpartisipasi dalam proses penyusunan yang kemudian didiskusikan di MPR. Ini adalah suatu bentuk demokrasi ekonomi-politik, dimana masyarakat ramai-ramai melakukan partisipasi ekonomi-politik. Sekarang, pemikiran mengenai pembangunan, dari manapun datangnya, harus dijual di pasar bebas politik. Gagasan itu diharapkan akan dibeli oleh politisi dan partai politik, kemudian oleh pemerintah yang berkuasa. Jika gagasan itu disosialisasikan lewat media massa, maka media massa pun berorientasi pada pasar gagasan yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik yang dominan.

Namun demikian, adalah tugas dan tanggung-jawab cendekiawan independen untuk mengemukakan gagasan yang terbaik bagi bangsa dan negara berdasarkan nalar moral (*moral reasoning*) dan nalar publik (*public reasoning*) yang bersumber dari hati nurani yang jujur, sebagaimana dikemukakan oleh cendekiawan tercerahkan, John Rawls dari Universitas Harvard.

Dalam menghadapi persoalan pembangunan di masa transisi menuju kepada demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, hal-hal yang diperhatikan adalah, urgensi untuk mengatasi masalah-masalah krisis yang dihadapi oleh bangsa dan negara, yaitu krisis pangan, krisis energi, krisis lingkungan hidup dan mungkinantisipasi atau

kewaspadaan terhadap krisis finansial sebagai dampak krisis keuangan AS yang memberi dampak ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia yang sudah ditandai oleh jatuhnya bursa saham, tertahannya pembiayaan bank karena penyetopan aktivitas *lending*, terganggunya pasar ekspor dan merosotnya nilai rupiah menyusul pengetatnya likuiditas mata uang dolar AS.

Paradigma ekonomi-politik Indonesia agaknya perlu menunggu penyelesaian dan akhir krisis keuangan AS. Sebuah artikel oleh Robert Skidelsky berjudul "Selamat Tinggal Revolusi Neo-Klasik" dan artikel Sri-Edi Swasono berjudul "*The End of Laissez-Faire*" mengisyaratkan terjadinya perubahan paradigma. Perubahan itu baru nampak, jika pemerintah telah meninggalkan Neo-liberalisme sebagai dasar orientasi kebijaksanaan dan jika orientasi pengajaran ilmu ekonomi politik telah diubah. Perspektif perubahan paradigma itu adalah menuju pada ideologi ekonomi-politik Demokrasi Ekonomi yang mengatasi kiri-kanan (*beyond right and left*) dan bertolak dari wacana ontologi perekonomian Indonesia sendiri.

Namun, sambil menunggu, perlu dijajagi paradigma baru ekonomi-politik Indonesia atas dasar *sense of crisis* dan urgensi mengatasi potensi krisis yang jika diabaikan akan bisa menimbulkan depresi ekonomi atau bahkan kebangkrutan ekonomi.

III.

Paradigma ekonomi-politik Indonesia mulai dibentuk pada awal abad ke 20 oleh politik etis (*etische-politiek*) yang dilahirkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda yang dilatar-belakangi oleh kondisi kemesosotan kemakmuran, yang ditandai oleh gejala kemiskinan dan keterbelakangan, sebagai dampak dari kebijaksanaan ekonomi liberal, khususnya di bidang hak milik tanah melalui UU Agraria (*Agrarische Wet*) tahun 1870, untuk mendukung ekonomi perkebunan yang berorientasi ekspor di tanah jajahan, melalui kepemilikan tanah secara individual. Politik etis itu terdiri dari tiga kebijaksanaan pembangunan, yaitu pendidikan (*educatie*), pengairan (*irigatie*) dan pemindahan penduduk (*transmigratie*). Ketiga hal itu menyimpulkan tiga unsur pembanguyan, yaitu pembangunan sumberdaya manusia (*human resource development*), modernisasi pertanian serta peluasan kesempatan kerja dan pengembangan ekonomi daerah khususnya di luar Jawa.

Sebenarnya kaum liberal dalam parlemen Belanda yang memelopori politik-etis itu juga mengusulkan program industrialisasi di Hindia Belanda, dalam rangka mengimbangi ekspansi ekonomi Jepang dalam perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Namun gagasan itu ditolak oleh golongan konservatif pro dunia usaha yang membangun ekonomi perkebunan di Indonesia. Alasannya, jika dilakukan industrialisasi di Hindia Belanda, maka tenaga kerja akan terserap atau lari ke sektor industri, sehingga perkebunan akan kekurangan tenaga buruh perkebunan yang murah.

Tetapi penolakan gagasan industrialisasi itu ada hikmahnya (*blessing in disguise*) yaitu memberi peluang bagi berkembangnya industri kecil yang merupakan ekonomi rakyat. Dengan basis itulah timbul gerakan Sarekat Dagang Islam (SDI) di Batavia (Jakarta) dan Solo. Sebenarnya masyarakat Indonesia yang dipimpin oleh kelas priyayi rendahan maupun bangsawan, telah memberikan respons terhadap gejala kemerosotan kesejahteraan dan keterbelakangan itu, yaitu dengan mendirikan bank koperasi perkreditan rakyat, mula-mula di Purwokerto pada tahun 1898 dan kemudian

berkembang di berbagai daerah dan kabupaten. Respon ini memberi sumbangan terhadap pembentukan paradigma pembangunan dari pihak kaum pribumi, yaitu dibutuhkannya lembaga perkreditan rakyat, lembaga koperasi dan industri rakyat, kesemuanya merupakan komponen dari perekonomian rakyat yang mengimbangi perekonomian kolonial. Faktor inilah yang mendasari berdirinya SDI yang bergerak menentang monopoli dengan mendirikan koperasi-koperasi.

Atas dasar itulah kaum liberal Belanda yang berpandangan progresif mendukung komponen paradigma baru itu, yaitu dengan mengembangkan lembaga perkreditan rakyat, koperasi dan diperluas dengan pendirian lumbung-lumbung padi sebagai lembaga pengaman sosial-ekonomi, terutama bagi petani. Dalam proses pembentukan paradigma pembangunan ini, SDI menyumbang gagasan anti-monopoli yang berarti menegaskan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi melalui koperasi. Dengan perkataan lain, SDI memulai proses demokratisasi ekonomi, yakni ekonomi yang didasarkan pada kedaulatan rakyat dan bukannya kedaulatan pasar dalam perekonomian kolonial yang melahirkan struktur monopoli dan stratifikasi pelaku ekonomi itu yang pada waktu itu telah nampak, yaitu paling atas adalah struktur ekonomi asing, lapisan kedua, struktur ekonomi Timur Asing terutama keturunan Cina yang berorientasi pada Nasionalisme Cina yang pada awal abad 20 itu mulai bangkit termasuk di Indonesia. Dan lapisan terbawah adalah struktur ekonomi pribumi yang membentuk ekonomi rakyat.

Pemerintah Hindia Belanda sebenarnya menganut kebijaksanaan ekonomi yang dualistik. Di satu pihak mendukung dan mengembangkan perekonomian asing berdasarkan kekayaan sumberdaya alam Indonesia, yaitu pertanian dan pertambangan yang bersifat ekstraktif tanpa pengembangan industri manufaktur. Tiadanya industrialisasi ini sebenarnya dalam rangka memelihara ekonomi ekspor-impor kolonial. Ekonomi pembangunan dan pertambangan mendukung ekspor sedangkan sektor perdagangan mendukung impor barang-barang industri yang diproduksi di negara-negara asing Belanda tetapi juga Jepang yang sudah mengalami revolusi industri.

Tetapi di lain pihak Pemerintah Hindia Belanda juga membantu mengembangkan ekonomi rakyat, terutama di bidang pertanian dan industri kecil, melalui wadah koperasi.

Namun, dalam realitas, Pemerintah Belanda lebih memperhatikan ekonomi pertanian, dari pada industri. Struktur ekonomi kolonial yang dualistik inilah yang melatarbelakangi pemikiran dan pandangan tentang pembangunan ekonomi di Tanah jajahan, pegawai Kementerian Kemakmuran Hindia Belanda, J.H. Boeke yang menulis disertasinya mengenai perekonomian yang dualistik itu, yang terdiri dari ekonomi *onderneming* (perkebunan) yakni perekonomian modern kolonial di tingkat atas, dan perekonomian rakyat di tingkat bawah (1952). Struktur perekonomian modern asing didasarkan pada rasionalitas pasar yang ditulis dalam teori-teori ekonomi Barat. Sedangkan struktur perekonomian bawah didasarkan pada nilai-nilai budaya, khususnya solidaritas, kekeluargaan dan kerjasama atau gotong-royong. Atas dasar itulah maka Boeke berpendapat bahwa wadah yang paling cocok bagi perekonomian pribumi atau perekonomian rakyat adalah koperasi. Dialah yang kemudian memelopori penyusunan UU Koperasi dan pendiri *Algemene Volkcreditbank*, yaitu lembaga perkreditan rakyat pusat atau nasional di Hindia Belanda.

Tesis Boeke itu menggugah perhatian para pemikir terhadap dua hal. Pertama masalah nilai-nilai sosial-budaya sebagai penghambat atau modal bagi perkembangan ekonomi. Kedua, keberadaan atau eksistensi perekonomian pribumi berhadapan dengan kekuatan ekonomi kapitalis yang rasional.

Masalah-masalah ini menjadi perhatian Mohammad Hatta, pelopor pemikiran ekonomi Indonesia yang mulai aktif menulis teori dan persoalan ekonomi pada awal dasawarsa '30-an, ketika ia masih menjadi mahasiswa di Negeri Belanda. misalnya dalam artikelnya "Pengaruh Kolonial-kapital di Indonesia" (1931), "Ekonomi Rakyat" dan "Ekonomi Rakyat dalam Bahaya" (1934). Persoalan kebudayaan sebagai masalah pembangunan juga diangkat kemudian oleh Sudjatmono (1954). Sebenarnya persoalan nilai yang ikut serta dalam mendorong perkembangan ekonomi khususnya ekonomi kapitalis, telah ditulis oleh Marx Weber pada tahun 1904 dalam bukunya "*The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism*" yang dikembangkan lebih lanjut oleh Arthur Lewis dalam bukunya "*The Theory of Economic Growth*" (1956). Secara lebih utuh, gagasan ekonomi ditinjau dari sudut nilai-nilai itu kemudian ditulis oleh Amitai Etzioni dalam bukunya "*The Moral Dimension, Toward New Economics*" (1988). Dan terakhir, Francis Fukuyama menulis buku berjudul "*Trust*" (1996) yang menguraikan konsep mosal sosial (*social-capital*) yang berintikan sejumlah nilai yang membangun *trust* atau amanah itu.

Dalam realitasnya, baik ekonomi kolonial-kapitalis maupun ekonomi rakyat mengalami perkembangan. Tapi ekonomi rakyat baru berkembang cepat dalam rasawarsa 30-an, ketika Pemerintah Kolonial melakukan liberalisasi ekonomi dengan memberikan kesempatan bahkan mendorong perekonomian rakyat untuk berkembang, walaupun dengan cara swadaya. Politik liberalisasi yang disebut juga politik kesejahteraan (*welfare policy*) itu adalah merupakan respon terhadap dampak depresi perekonomian kapitalis dunia di Hindia Belanda, yang mendorong radikalisi gerakan kemerdekaan. Namun pada dasawarsa itu, seorang tokoh pergerakan mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda menulis sebuah peringatan tentang kemunduran kesejahteraan sosial-ekonomi rakyat kedua, baik sebagai kelanjutan kemunduran kesejahteraan sosial karena politik ekonomi Belanda maupun sebagai akibat malaise atau depresi ekonomi dunia sejak 1929 yang berdampak ke Hindia Belanda juga, karena perekonomian Hindia Belanda telah terintegrasi dan menjadi bagian dari kapitalisme global, melalui perdagangan ekspor-impor dan investasi asing.

Dalam perkembangannya, sistem ekonomi kapitalis yang bermula di Eropa Barat berdasarkan rasionalitas pasar sebagaimana ditulis dalam mazhab Neo-Klasik yang lahir pada perputaran abad 19 ke 20 di Eropa Barat, mengalami krisis, yang dipicu oleh keruntuhan bursa saham (*Crash*) AS yang dilatar-belakangi oleh kegagalan pasar, khususnya pertanian yang mengalami kelebihan produksi sehingga penawaran tidak otomatis menciptakan permintaan yang menyimpang dari dalil ekonom Neo-Klasik, Jean Babtise Say yang mengatakan bahwa penawaran dengan sendirinya akan menciptakan permintaan (*supply creates its own demand*). Krisis yang berkembang menjadi Depresi Dunia itu dampaknya juga melanda Hindia Belanda. Jika Pemerintah AS mengatasi depresi itu dengan investasi Pemerintah di bidang pekerjaan umum (*public work*), maka Pemerintah Hindia Belanda mengatasi masalah pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan itu dengan memberi kesempatan kepada kaum pribumi guna mengembangkan industri kecil dan koperasi-koperasi pertanian yang sesungguhnya merupakan potensi ekonomi terpendam sejak awal abad ke 20. Dengan perkataan lain, Pemerintah Hindia Belanda menyetujui kebijaksanaan industrialisasi, tanpa investasi asing, yaitu dengan industri kecil dan kerajinan yang merupakan industri rakyat. Dari sinilah berkembang sentra-sentra produksi industri di desa maupun kota yang sampai sekarang masih lestari walaupun mengalami metamorfosa dalam jenis produksi. Ahli ekonomi-sosiologi Belanda, Burger menilai bahwa perkembangan

ekonomi rakyat dalam dasawarsa '30-an menunjukkan bahwa ekonomi pribumi lebih cepat berkembang dari ekonomi kaum Cina dan bahkan berperan merintis pertumbuhan industri.

Demikian pula, berkembang koperasi-koperasi pertanian. Jika pada awal abad, koperasi itu digerakkan oleh SDI, maka pada awal dasawarsa 30-an, koperasi pertanian digerakkan oleh Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang didirikan oleh sejumlah cendekiawan yang dipimpin oleh Dr. Sutomo yang pernah mendirikan Boedi Oetomo bersama-sama kawan-kawannya kaum cendekiawan kebangsaan.

Pembangunan industri kecil dan koperasi pertanian ini menambah komponen paradigma pembangunan Indonesia sebelum Perang Dunia II, ketika Hindia Belanda masih merupakan negeri jajahan. Pada tahun 1937 pejabat Biro Industri dalam Kementerian Kemakmuran, Sitsen, melancarkan program pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat, dengan memperkuat basis teknologi yang tepat guna. Dengan demikian maka, paradigma pembangunan Indonesia berkembang strukturnya dengan komponen teknologi tepat guna yang memproduksi kebutuhan utama masyarakat. Pola produksi yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja dan partisipasi rakyat yang luas inipun juga merupakan komponen baru dalam paradigma pembangunan.

Paradigma pembangunan yang berkembang secara evolusioner sejak awal abad 20 yang dilatar-belakangi oleh kondisi merosotnya kesejahteraan rakyat itulah yang membentuk prinsip Demokrasi Ekonomi. Menurut Prof. Sri- Edi Swasono yang mengartikulasikan konsep Demokrasi itu, maka Demokrasi Ekonomi berlandaskan dua prinsip, yaitu pertama, partisipasi ekonomi dimana rakyat memegang kedaulatan ekonomi dan kedua emansipasi ekonomi, yang membebaskan rakyat dari eksploitasi, diskriminasi dan predatori sistem ekonomi kapitalis. Kedaulatan rakyat yang menggantikan kedaulatan pasar dapat diwujudkan melalui pembangunan kemandirian ekonomi berdasarkan swadaya. Kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, berarti juga pembebasan ekonomi dari ketergantungan, yaitu ketergantungan modal, ketergantungan teknologi dan ketergantungan pasar atau perdagangan pada struktur monopolistik perekonomian kapitalis yang di Amerika Latin diartikulasikan oleh pemikir Neo-Marxis menjadi teori ketergantungan Pusat-Pinggiran.

Struktur paradigma pembangunan itulah yang mendasari perumusan pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945, yaitu pasal 27 ayat 2 "Tiap warga negara berhak pada pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" yang merupakan penjelasan dari Kesejahteraan Sosial", suatu gagasan yang merespon kondisi kemunduran kesejahteraan rakyat pada akhir abad 19, tapi terus berlanjut pada abad 20. Hal ini ditandai oleh insiden kemiskinan yang terjadi di berbagai tempat dan waktu yang berbeda. Kondisi ini memuncak pada awal dasawarsa '30-an karena dampak malaise perekonomian kapitalis dunia.

Tujuan "kesejahteraan sosial" itu, yang merupakan judul Bab XIV, terdiri dari dua komponen. Pertama dijelaskan oleh pasal 33 yang berisikan segi epistemologi dari Demokrasi Ekonomi yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak, dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tiga pasal itu sebenarnya mencerminkan respon terhadap struktur ekonomi kolonial, dengan membalik jenjang pelapisannya. Struktur ekonomi rakyat diutamakan dan di taruh diatas sebagai sektor yang memimpin. Kemudian perusahaan skala besar milik asing digantikan oleh perusahaan-perusahaan milik negara serta ditempatkan di lapisan kedua, Dalam konteks sekarang timbul pertanyaan, apakah sistem ekonomi Indonesia menutup kesempatan bagi sektor swasta nasional yang pada zaman kolonial berada di tengah-tengah yang dikuasai oleh warga Timur Asing, khususnya keturunan Cina. Bung Hatta yang merupakan arsitek pasal 33 itu menjelaskan bahwa sektor swasta itu tetap diberi kesempatan untuk menjadi pelaku yang mendukung sistem ekonomi, tetapi tidak untuk menjadi sektor yang memimpin.

Pasal 2 dan 3 juga memunculkan pertanyaan mengenai peranan negara yang "menguasai" sektor yang dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak, dan penguasaan sumberdaya alam, apakah penguasaan berarti menguasai melalui kepemilikan dan pengelolaan perusahaan negara ataukah dengan pengaturan, yang penting memakmurkan rakyat. Juga menjadi pertanyaan tentang yang dimaksud dengan "cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara" dan "menguasai hajat hidup rakyat banyak". Dari pengalaman negara-negara sosialis atau paham sosialis semacam sosialisme Fabian Inggris, yang diartikan sebagai penting bagi negara adalah industri strategis atau industri dasar. Mungkin yang dimaksud dengan menguasai hajat hidup rakyat banyak adalah apa yang tergolong sebagai kebutuhan dasar atau *basic-need*, kemudian disebut dalam tulisan Bung Hatta, yaitu yang mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan yang memang menjadi industri barang dan jasa. Masalahnya adalah, apakah tepat jika cabang produksi kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan dan papan itu harus dikuasai Negara. Dalam realitas, bahan kebutuhan pokok itu justru dikuasai oleh ekonomi rakyat. Itulah masalah ekonomi-politik yang dihadapi oleh Pemerintah setelah mencapai kemerdekaan yang menimbulkan interpretasi yang beragam mengenai prinsip dasar ekonomi-konstitusional (*constitutional economics*) dalam UUD.

Prinsip dasar terakhir yang disebut dalam Bab XIV adalah pasal 33 yang mengatakan "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Pasal ini juga merupakan respon terhadap kondisi kesejahteraan rakyat di masa penjajahan. Tapi prinsip ini juga mengandung masalah interpretasi sehubungan dengan peranan dan cara Negara melaksanakan prinsip ini, yakni bagaimana Negara memelihara fakir miskin dan anak yang terlantar, apakah dengan mendirikan suatu lembaga negara atau secara tidak langsung melakukan kewajiban itu, misalnya mengeluarkan peraturan dan kebijaksanaan untuk mengentaskan mereka yang tergolong fakir miskin dan anak yang terlantar dari kemiskinan, dengan misalnya mendorong organisasi kemasyarakatan dan keagamaan untuk mendirikan panti asuhan atau panti jompo, mengembangkan asuransi jaminan sosial, mengarahkan penggunaan zakat, sadaqah, infaq dan wakaf untuk kegiatan produktif yang hasilnya dipakai untuk santunan kepada fakir miskin dan anak terlantar. Pemerintah juga bisa menetapkan kontribusi sosial untuk penjaminan sosial. Pasal ini juga membentuk struktur paradigma pembangunan di masa kemerdekaan.

IV.

Di masa kemerdekaan, Pemerintah RI kemudian memang menjadikan prinsip-prinsip dasar dalam UUD '45 itu sebagai acuan pembangunan dan kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, yang dikawal oleh Bung Hatta. Walaupun demikian selama 5 tahun pertama, Pemerintah belum bisa banyak berbuat di bidang pembangunan ekonomi, mengingat gangguan politik dan keamanan dan ancaman kembalinya penjajah Belanda untuk memulihkan kekuasaan kolonialnya. Ekonomi di masa itu bisa juga disebut sebagai "ekonomi perang" yang menyerupai "ekonomi depresi", meminjam istilah Paul Krugman, apalagi Negara juga masih kekurangan dana. Tapi Pemerintah demi Pemerintah tetap berusaha mengembangkan perekonomian misalnya dengan mendirikan bank pembangunan, menasionalisasi bank-bank kolonial dan mendirikan perusahaan-perusahaan negara, sekolah-sekolah dan rumah sakit rumah sakit.

Tapi pada dasarnya, Pemerintah lebih berperan mendorong dan melindungi perkembangan ekonomi rakyat, meneruskan perkembangan ekonomi rakyat yang telah dibangun di masa kolonial, baik di bidang pertanian, industri maupun perdagangan dan jasa. Dalam upaya mendukung usaha rakyat, Pemerintah menasionalisasi *Algemene Volkscredietbank* (AVB) menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan untuk mendukung perusahaan negara (PN), Pemerintah di awal kemerdekaan, atas perintah Wakil Presiden Hatta, mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1946.

Dalam melaksanakan pasal 33 ayat 1, Pemerintah mendorong perkembangan koperasi-koperasi. Dalam rangka memperkuat kedudukan dan peran koperasi dalam perkembangan ekonomi, gerakan koperasi kemudian menyelenggarakan kongresnya dan sepaham untuk membentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) pada tahun 1947. Baru pada tahun 1950, dimulai oleh Kabinet Natsir, Pemerintah lebih aktif membina koperasi melalui pendidikan, penerangan dan penyediaan kredit secara terbatas. Sejak itu gerakan koperasi mengalami perkembangan yang meyakinkan yang dilaporkan oleh Wakil Presiden Hatta, pada setiap Hari Koperasi melalui pidato radio, dengan mengumumkan perkembangan fundamental ekonomi koperasi sehingga perkembangannya terukur.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah pada awal kemerdekaan mengikuti paradigma ekonomi liberal, dengan campur tangan Negara yang minimal, mengingat keterbatasan budget. Pada masa Kabinet Natsir itu juga, Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara yang juga menjadi jurubicara ekonomi partai politik Islam Masyumi, memperkenalkan sistem anggaran berimbang (*balanced-budget*) yang anti inflasi itu guna menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas moneter yang oleh Kenneth Boulding disebut sebagai salah satu tujuan kebijaksanaan ekonomi, di samping pertumbuhan ekonomi dan keadilan ekonomi ini adalah juga unsur paradigma baru ekonomi-politik Indonesia. Kebijakan ini dikembangkan lebih lanjut oleh Sjafruddin ketika ia menjabat Gubernur Bank Sentral, Bank Indonesia yang pertama. Dalam kapasitasnya itu ia mengusulkan prinsip independensi Bank Sentral dan menjalankan kebijaksanaan moneter yang mengimbangi kebijaksanaan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah. Namun usulnya itu terhambat oleh orientasi fiskal sehingga menghasilkan kompromi dengan mendirikan Dewan Moneter yang mewadahi interaksi antara Pemerintah dan Bank Sentral. Kebijakan ini sebenarnya mengukuhkan paradigma ekonomi liberal yang berhasil menjalankan kebijaksanaan ekonomi yang efektif dalam menciptakan stabilitas moneter yang anti inflasi sebagai iklim yang kondusif bagi dunia usaha.

Pada masa Kabinet Natsir itu Pemerintah mengambil prakarsa untuk melakukan industrialisasi dengan program "Urgensi Industrialisasi". Tapi yang menjadi perhatian adalah pengembangan industri kecil atau industri rakyat yang sudah berkembang sejak pertengahan dasawarsa '30-an. Di samping itu Pemerintah juga mengembangkan usaha-usaha perdagangan, terutama para importir, melalui "Politik Benteng", sehingga melahirkan pengusaha-pengusaha besar di kalangan pribumi. Kebijakan itu ikut dinikmati oleh juga koperasi dengan membesarkan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) dan koperasi-koperasi primer di sentra-sentra industri batik. Dari keuntungan impor itu GKBI dan berbagai koperasi primer berhasil membangun industri tekstil modern, bekerjasama dengan Jepang. Pengembangan industri kecil, koperasi dan pedagang pribumi itu menjadi komponen paradigma baru dalam pembangunan Indonesia, Kabinet Natsir sendiri disebut oleh pengamat asing sebagai "kabinet ahli" (*Zaken Kabinet*) yang dibentuk oleh Wakil Presiden Hatta itu mengembangkan peranan teknokrat ekonomi yang kemudian diadopsi oleh Pemerintah Orde Baru dalam kerangka pemikiran ekonomi liberal yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional-pragmatis.

Namun dengan dibubarkannya partai Masyumi dan PSI yang memimpin paradigma ekonomi liberal itu, terjadi pergeseran orientasi dari ekonomi liberal ke ekonomi sosialis. Pergeseran paradigmatis ini didorong oleh wacana sosialis yang dikembangkan oleh Bung Karno dengan dukungan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) rival Masyumi-PSI. Hatta sendiri yang di Eropa terlibat dalam Kongres Sosialis Internasional, memberi respon positif dengan konsepnya sendiri mengenai sosialisme. Pada waktu itu, pandangan yang dominan adalah, bahwa sosialisme harus diterapkan sesuai dengan kondisi Indonesia. Pandangan ini dikemukakannya dalam konsepnya mengenai Marheanisme yang dirumuskannya sebagai "Marxisme yang disesuaikan menurut kondisi Indonesia", dimana kelas yang dominan adalah kelas petani dan pengusaha kecil, sedangkan kelas buruh belum berkembang, karena Indonesia belum mengalami industrialisasi. Bersama dengan Marheanisme muncul beberapa istilah, seperti "Sosialisme a la Indonesia" dari Ruslan Abdulgani, "Sosialisme Religius" dari Sjafrudin Prawiranegara dan "Sosialisme Kerakyatan" dari St. Sjahrir. Bung Hatta sendiri memperkenalkan istilah "Sosialisme Indonesia" yang bercorak nasionalis. Menurut pendapatnya, Sosialisme Indonesia berakar dari tiga sumber, yaitu sosialisme ilmiah, ajaran Islam dan nilai sosial-budaya Indonesia sendiri. Di sini Hatta nampak menyetujui pandangan Boeke mengenai nilai-nilai budaya yang menuntun perilaku manusia Indonesia. Demikian juga mengakui adanya Sosialisme Islam yang mula pertama diperkenalkan oleh H.O.S. Tjokroaminoto. Belakangan konsep Sosialisme Islam itu berkembang menjadi konsep Ekonomi Islam yang juga di bahas oleh Sjafruddin Prawiranegara yang mengkombinasikan konsep sosialisme, teori Neo-Klasik dan ajaran Islam di bidang ekonomi.

Pergeseran paradigma kearah sosialisme itu ditandai, pertama oleh nasionalisasi perusahaan asing yang digantikan oleh perusahaan negara. Kedua, berkembangnya lembaga perencanaan pusat, dimulai dengan pendirian biro perencanaan industri dalam Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, kemudian berkembang menjadi Dewan Perencanaan Nasional (Depernas) dan kemudian menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ketiga kebijaksanaan memasukkan Gubernur Bank Sentral dalam pemerintahan, sehingga menghilangkan independensi Bank Sentral yang menghapus ciri moneterisme. Keempat adalah pembinaan koperasi secara langsung oleh Pemerintah sehingga koperasi menjadi alat kebijaksanaan Pemerintah. Dan kelima

ditegakkan sistem ekonomi perencanaan pusat (*centrally economic planning system*) yang menghasilkan naskah Rencana Pembangunan Semesta 8 tahun. Salah satu ciri yang menonjol dalam program kabinet itu adalah pengembangan industri kecil dan koperasi yang mengandung pemikiran tentang pembinaan langsung koperasi oleh Pemerintah yang menyimpang tradisi Hatta dalam mengembangkan koperasi secara tidak langsung. Akibatnya terjadi politisasi gerakan koperasi yang kemudian menjadi ajang perebutan penguasaan oleh empat partai besar, PNI, Masyumi, PKI dan NU. Paradigma ini berkembang sejak 1957 hingga 1965 di bawah kepemimpinan otoriter Presiden Sukarno, ketika Bung Hatta telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden yang selalu bertindak sebagai pengawal perekonomian berpedoman pada pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945.

Namun Bung Hatta, tetap mendukung orientasi ke sosialisme melalui tulisan-tulisannya, sebagai cendekiawan bebas. Ada tiga buku utama Bung Hatta yang menyumbang kepada struktur paradigma pembangunan sosialis, yaitu "Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia" (1963), "Ekonomi Terpimpin" (1967) dan "Ekonomi Berencana" (1971). Hatta juga menulis artikel di majalah Panji Masyarakat yang berjudul "Sosialisme Indonesia" yang menjelaskan bahwa sumber-sumber Sosialisme Indonesia. Tulisan-tulisan Bung Hatta itu sebenarnya adalah juga dalam rangka mengawal perkembangan paradigma ekonomi Indonesia yang bertolak dari perkembangan pemikiran ekonomi-politik Indonesia sendiri.

Sungguhpun begitu kepemimpinan Bung Karno berjalan tanpa kendali yang lebih mengutamakan pembangunan politik dari pembangunan ekonomi, dengan semboyan "politik sebagai panglima". Dalam artikelnya yang dimuat dalam majalah Panji Masyarakat yang berjudul "Demokrasi Kita", Bung Hatta, lagi-lagi memperingatkan Bung Karno, agar memikirkan aspek rasionalitas ekonomi dalam pembangunan. Penempatan Bank Sentral ke dalam kabinet ternyata berakibat fatal. Karena Bung Karno dalam Kabinet Gotong Royong-nya ingin membiayai Pembangunan Semesta Berencana 8 tahun yang sangat ambisius itu bersama-sama dengan pembangunan politik, dengan mencetak uang, maka akhirnya perekonomian Indonesia yang tidak produktif dan efisien itu dilanda inflasi tiga digit. Maka terjadilah ramalan Bung Hatta, tentang runtuhnya bangunan politik yang dihakimi oleh kondisi ekonomi itu.

Maka ketika Bung Karno telah dijatuhkan oleh militer Indonesia yang didukung oleh rakyat, Prof. Widjojo Nitsastro, memperkenalkan gagasan mengenai pendekatan pembangunan yang rasional-ekonomis, mengikutri aliran Neo-Klasik. Gagasan itu, setelah diseminarkan dalam Seminar "Trace Baru" Angkatan '66, dituangkan ke dalam konsep strategi pembangunan yang disyahkan menjadi TAP MPRS no. XXIII/MPRS/1966.

Inti dari konsep itu adalah pertama, mengembalikan orientasi pembangunan kepada prinsip Demokrasi Ekonomi. Kedua, menyusun rencana pembangunan lima tahun. Ketiga, mendampingi anggaran fisik dengan anggaran moneter berimbang yang menjaga stabilitas moneter. Konsep ini menimbulkan wacana dan kebijaksanaan fiskal dan kebijaksanaan moneter. Anggaran moneter itu terdiri dari anggaran rupiah yang mendukung stabilitas internal dan anggaran devisa yang mendukung stabilitas eksternal. Keempat, meletakkan pertanian sebagai sektor utama yang menjadi tulang punggung industrialisasi. Ke lima mengembangkan perdagangan internasional dalam rangka memperkuat cadangan devisa.

Konsep pembangunan Orde Baru itu pada dasarnya memilih beberapa unsur paradigma yang sudah lebih dahulu dikembangkan, yaitu prinsip dasar Demokrasi Ekonomi, pembangunan berencana, stabilitas moneter dan pembangunan pertanian sebagai tulang punggung industrialisasi yang sebenarnya merupakan kombinasi dari gagasan Hatta dan Sjafrudin Prawiranegara.

Dalam pelaksanaannya, pembanguana ekonomi dilaksanakan melalui tiga tahap, sebagaimana dirumuskan oleh Emil Salim. Pertama adalah menciptakan rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi. Kedua, mencapai pertumbuhan ekonomi. Dan ketiga menciptakan pemerataan pembangunan. Sasaran pertama dicapai dengan pembangunan prasarana ekonomi dan kebijaksanaan anti-inflasi yang ketat, dengan anggaran berimbang yang didukung dengan utang luar negeri. Sasaran kedua dicapai dengan investasi luar negeri dan pengembangan ekonomi sektor swasta dan gerakan tabungan nasional. Sedangkan sasaran ketiga, sebenarnya baru timbul kemudian setelah diketahui realitas bahwa pertumbuhan ekonomi ternyata tidak otomatis memecahkan masalah kemiskinan sebagaimana diklaim dalam adagium "*trickle down effect*" atau "*other things will be taken off by growth*". Pemerintah Orde Baru yang sangat percaya diri itu ternyata telah kecolongan'

Pembangunan prasarana, pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya adalah sumbangan ekonomi Orde Baru terhadap paradigma pembangunan. Pembangunan prasarana ekonomi, baik prasarana jalan dalam dan antar kota, maupun irigasi di pedesaan memang merupakan landasan perkembangan ekonomi, sehingga prasarana fisik menjadi jenis modal baru (*infra-struktural capital*). Pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat serta pembentukan modal (*capital information*). Namun pada pertengahan dasawarsa '70-an timbul isu kemiskinan massal yang didukung oleh data-data statistik, sehingga timbul upaya pemikiran untuk memberantas kemiskinan dan pemerataan pendapatan dari pertumbuhan ekonomi itu. Dari sinilah lahir program delapan jalur kemiskinan pada tahun 1978 yang didukung oleh dana migas dan utang luar negeri. Dalam politik pemerataan itu, Pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap usaha kecil dan koperasi yang dahulunya dirintis oleh Pemerintahan Natsir. Berkat program pemberdayaan itu, industri kecil dan koperasi mengalami kebangkitan kembali, sehingga makin menjadi perhatian masyarakat. Tetapi pemikiran itu mendorong Pemerintah untuk tidak mengejar pertumbuhan ekonomi dan untuk lebih memperhatikan kebijaksanaan pemerataan dan pemberantasan kemiskinan.

Kebijaksanaan baru yang melengkapi tiga tahap kebijaksanaan menjadi tahap rehabilitasi dan stabilisasi, pertumbuhan dan akhirnya pemerataan itu mendorong tokoh kedua teknokrat untuk merenung mengenai sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia. Sebenarnya, ketika masih menjadi peneliti LEKNAS-LIPPI di bawah pimpinan Prof. Widjojo Nitisastro, ia pernah menulis teori mengenai Sistem Ekonomi Indonesia, dengan melakukan dekonstruksi teori sistem ekonomi sosialis-kapitalis dan menemukan empat model sistem, yaitu model swasta, model kontrol, model kolektif dan model perencanaan pusat. Pada waktu itu ia melihat bahwa sejak kemerdekaan, paradigma pembangunan bergerak ke kiri-kanan, seperti bandung jam (*pendulum swing*) sehingga sampai ke titik keseimbangan di tengah-tengah yang merupakan jalan lurus. Pada titik itulah ketemu Sistem Ekonomi Pancasila. Pandangan itu ditulisnya di jurnal Prisma, Januari, 1979 yang disetujui oleh rekannya, Prof. Moh. Sadli.

Pandangan itu didukung pula oleh Prof. Mubyarto-Boediono dari FE-UGM yang kemudian mengundang para ekonom terutama lulusan UGM dalam suatu seminar pada

tahun 1980 untuk memperinci sistem ekonomi dari banyak segi, dari makro ke mikro yang mencakup aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Di koran, konsep itu masih ditanggapi secara kritis oleh Arief Budiman, Sjahrir, Hendra Esmara dan Prof. Sarbini Sumawiyata, sehingga menjadikan konsep Ekonomi Pancasila itu masih kontroversial. Tapi berbagai kritik itu dijawab oleh Mubyarto-Boediono dan akhirnya menghasilkan beberapa buku tulisan Mubyarto, terutama "Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan" (1987) yang memperinci ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu sebagai ekonomi moral dan sosial, berlandaskan egalitarianisme, berwatak nasionalis, bersendikan organisasi koperasi dan mengarah ke desentralisasi atau didukung oleh perekonomian daerah. Sebagian dari ciri-ciri itu sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Orde Baru, tapi masih kurang egaliter dan nasionalis. Azas egalitarianisme dan corak nasionalisme itu mempertegas paradigma Pembangunan Indonesia ketika itu. Egalitarianisme mengimbangi kebijaksanaan pertumbuhan dan nasionalisme ekonomi dipakai untuk menanggapi isu globalisasi pada belahan kedua dasawarsa '90-an.

Tapi titik balik paradigmatis ke arah ekonomi kapitalis-liberal yang menyimpang dari jalan lurus Ekonomi Pancasila, sebenarnya sudah timbul pada awal dasawarsa '80-an justru ketika konsep Ekonomi Pancasila seharusnya diimplementasikan di tingkat kebijaksanaan. Kecenderungan itu dipengaruhi oleh resesi perekonomian dunia. Sebagai respon terhadap resesi itu, maka tiga kebijaksanaan utama dilaksanakan. Pertama, meningkatkan kembali target pertumbuhan ekonomi. Kedua, menggalakkan ekspor non migas. Ketiga reformasi fiskal dengan sasaran menaikkan perolehan pajak dan reformasi moneter dengan target menghimpun dana perbankan dengan jalan membebaskan penentuan suku bunga tabungan maupun pinjaman. Ketiga kebijaksanaan ini diikuti oleh penurunan paket-paket deregulasi, yang sasaran peningkatan efisiensi produksi dalam menghadapi pasar dunia yang kompetitif dalam komoditi non-migas untuk ekspor. Unsur paradigma baru yang lahir dari kebijaksanaan itu adalah menggantikan penerimaan negara dari sumber migas ke pajak dan pentingnya faktor efisiensi ekonomi, jika Indonesia hendak lebih dalam masuk ke pasar global.

Sejak 1983 adalah awal era liberalisasi yang lebih berorientasi ke pasar. Bank-bank dan lembaga keuangan non-bank mengalami perkembangan pesat. Perbankan bersaing dengan bursa saham. BI menaikkan suku bunga bank guna menarik dana yang lebih besar untuk perbankan dengan konsekuensi bank-bank harus menjaga CAR atau rasio kecukupan modal. Jika kesulitan menyediakan modal baru, BI menganjurkan untuk melakukan merger sehingga lahir bank-bank yang lebih besar. Sementara itu persyaratan untuk mendirikan bank diperketat. Penaikan suku bunga dimaksudkan untuk menarik dana ke bank, termasuk menarik dana dari luar negeri. Namun akibatnya, dunia usaha harus ke luar negeri untuk bisa mendapatkan pinjaman.

Kebijaksanaan bunga tinggi itu ditentang oleh B.J. Habibie, karena ia bermaksud untuk mendorong transformasi industri ke arah industri yang punya nilai tambah tinggi melalui teknologi canggih. Untuk itu, suku bunga harus cukup rendah agar pengusaha dapat memperoleh modal. Dalam rangka transformasi industri itu, Habibie mengajukan paradigma baru, yaitu bergeser dari prinsip keunggulan komparatif (*comparative advantage*) ke keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Di tingkat teori, pada ahli ekonomi juga mulai membantah teori Ricardo agar setiap negara memiliki spesialisasi produksi berdasar sumberdaya yang dimiliki. Ternyata, seperti dijelaskan oleh Paul Krugman, melalui teknologi dan sumberdaya manusia yang bermutu, suatu negara bisa membangun industri yang tidak didasarkan oleh faktor keunggulan komparatif. Dalam wacana selanjutnya, para ekonom berpendapat bahwa untuk

Indonesia, prinsip komparatif advantage tidak bisa diandalkan, tetapi argumen keunggulan kompetitif bisa diterima juga, sehingga paradigma yang dibentuk perlu menggunakan kombinasi dua prinsip keunggulan itu. Pemikiran Habibie itu, pada awal abad 21, dikembangkan menjadi konsep modal intelektual (*intellectual capital*) yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, kombinasi antara teknologi dan sumberdaya manusia.

Banyak yang salah dalam memahami gagasan Habibie itu, terutama dari para ekonom. Mereka menduga bahwa strategi teknologi itu menjadi investasi padat modal yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Padahal, Habibie berfikir bahwa perusahaan besar dengan teknologi canggih seperti industri transportasi, khususnya pesawat terbang itu, menciptakan banyak industri kecil dan menengah yang berperan sebagai vendor atau sub-kontraktor yang menggunakan teknologi yang lebih sederhana. Hal ini diperlihatkan oleh industri elektronik Nasional atau industri assembling mobil Astra. Industri yang dimaksudkan Habibie itu akan bisa menjadi pusat invensi dan inovasi, misalnya industri sabut kelapa untuk jok kendaraan bermotor. Bahkan kerajinan elektronik yang menghasilkan komponen industri itu dapat dikerjakan di pesantren-pesantren, seperti yang telah dilakukan oleh industri elektronik Korea Selatan di Indonesia yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan yang teliti dan telaten. Tapi dengan lengsernya Habibie dari pemerintahan, gagasannya ikut dibekukan.

Namun, di akhir pemerintahan Presiden Sukarto yang jatuh pada tahun 1998, MPR sempat mengeluarkan TAP MPR tentang pembinaan Ekonomi Rakyat. TAP itu kemudian dilaksanakan oleh Presiden Habibie, sehingga usaha kecil dan usaha mikro atau sektor informal mengalami revitalisasi. Usaha kecil dan mikro ini ternyata menjadi bumer ketika perekonomian Indonesia dilanda krisis. Gejala ini mirip dengan perkembangan di dasawarsa '30-an. Bedanya, di zaman kolonial itu industri kecil merupakan respons dan berkembang setelah depresi, sedangkan pada awal abad 21, industri kecil dan mikro yang telah berkembang terlebih dahulu menjadi bumer bagi perekonomian di masa krisis. Situasi ini memperkuat paradigma yang menghargai kedudukan dan peranan ekonomi rakyat, sehingga mengembangkan konsep mengenai ekonomi kerakyatan yang banyak diadvokasikan oleh Prof. Mubyarto itu.

Pada tahun 1997 Indonesia dilanda oleh krisis moneter yang dimulai di Thailand dan menjalar ke Indonesia, antara lain karena tidak melaksanakan gagasan dan usul Habibie mengenai suku bunga bank. Sebagai akibat krisis, banyak bank dan industri besar mengalami kebangkrutan. Untuk menanggulangi kebangkrutan itu, Pemerintah, melalui Bank Indonesia, merasa perlu mengucurkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas anjuran IMF, yang banyak menimbulkan kontroversi itu, karena menimbulkan skandal mega korupsi di kalangan pejabat Pemerintah maupun swasta besar. Namun hal ini menyadarkan Pemerintah di masa reformasi yang lahir dari hasil Pemilihan Umum 2004 tentang urgensi pemberantasan korupsi sebagai benalu pembangunan. Ekonomi anti-korupsi ini merupakan paradigma baru dalam Kabinet SBY-MJK (Susilo Bambang Yudoyono dan Mohammad Yusuf Kalla).

Di masa krisis ekonomi sejak 1997 itu timbul suatu paradoks. Di satu pihak, bank-bank dan usaha-usaha besar mengalami kebangkrutan. Tapi di lain pihak, usaha agribisnis, usaha kecil, perkreditan mikro dan lembaga keuangan syariah mengalami kebangkitan. Bank syariah mengalami pertumbuhan pesat karena membuktikan diri bisa *survive* di masa krisis, karena tidak menerapkan sistem bunga bank. Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) yang mula-mula lambat tumbuh bahkan memerlukan suntikan dana dari Bank Pembangunan Islam (IDB), sejak itu tumbuh cepat. Tetapi

sebuah bank syariah pemerintah yang baru, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), langsung tumbuh lebih cepat sehingga menjadi bank syariah terbesar. Demikian pula lembaga asuransi syariah, takaful, berkembang cepat juga sehingga menjadi lembaga keuangan kedua terbaik di tahun 2008, di bawah BSM yang karena menjadi bank syariah terbaik 2008 dilihat dari fundamental ekonominya, telah meraih penghargaan dari Global Finance, AS. Keuangan syariah itu menjadi elemen paradigma baru pembangunan Indonesia.

V.

Selama setengah abad pembangunan di Indonesia, telah terjadi banyak perubahan dan pergeseran di tingkat paradigmatis yang disebabkan oleh dinamika politik perekonomian yang diobsesi oleh tujuan untuk mentransformasikan perekonomian Indonesia dari kolonial yang dualistik ke perekonomian nasional yang integral. Obsesi di bidang ekonomi itu sebenarnya melanjutkan upaya menegaskan kedaulatan politik ke kedaulatan ekonomi yang mula-mula dilaksanakan dengan menerbitkan uang kertas RI di awal kemerdekaan dan nasionalisasi serta konversi *De Javaschebank* menjadi Bank Indonesia, sebagai bank sentral.

Secara berangsur-angsur Pemerintah sejak awal kemerdekaan mendirikan perusahaan negara dan menasionalisasi perusahaan asing untuk dikonversi menjadi perusahaan negara, baik di bidang perbankan, perkebunan, kehutanan, perdagangan dan transportasi darat, laut, dan udara, mengikuti ayat 2 dan 3 Pasal 33 UUD '45. Pemerintah juga mendirikan perusahaan negara yang baru di bidang tekstil dan farmasi sehingga perusahaan negara yang kemudian disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di masa Orde Baru berjumlah 240 unit, kesemuanya modalnya berasal dari Pemerintah.

Di masa Orde Baru, ketiga sektor itu dikembangkan sekaligus. BUMN jelas dikuasai oleh negara, tetapi juga koperasi menjadi alat kepanjangan kebijaksanaan Pemerintah, terutama di bidang pertanian guna mencapai swasembada beras yang baru bisa dicapai pada tahun 1985. Sedangkan sektor swasta mendapat kebebasan terluas, termasuk sektor swasta asing. Dengan demikian, Pemerintah Orde Baru mengkombinasikan nasionalisme ekonomi dengan liberalisme ekonomi. Pada akhir dasawarsa '80-an, BUMN masih berkedudukan dominan, walaupun perusahaan swasta berkembang sangat cepat sehingga menghasilkan konglomerasi-konglomerasi perusahaan yang dimiliki oleh orang seorang. Perkembangan konglomerasi ini sebenarnya telah menuai kritik keras pada awal 80-an. Tapi perkembangan nyata itu telah merubah posisi para aktor ekonomi. Pada dasawarsa '90-an, dengan krisis yang dihadapi oleh banyak BUMN, sektor swasta, domestik atau asing, menduduki posisi dominan yang berbagai bidang dan berperan memimpin, sehingga terjadi "*private sector led development*" dalam alam liberalisasi ekonomi. Namun di bidang perbankan misalnya, bank-bank terbesar adalah bank-bank negara, walaupun Bank Central Asia (BCA) menjadi bank nomor dua terbesar. Dari 10 bank terbesar 4 adalah bank BUMN dan 6 bank swasta. Perusahaan telekomunikasi juga didominasi oleh BUMN dan menjadi badan usaha yang sangat menguntungkan dan makin besar nilai asetnya. Namun di bidang perminyakan dan perhubungan, monopoli dipegang oleh BUMN walaupun dalam kondisi tidak efisien dan bahkan merugi.

Pada awal dasawarsa '70-an, industri rakyat mengalami marginalisasi sebagai dampak perkembangan sektor swasta dan kebijaksanaan impor barang-barang industri. Namun kemudian, usaha kecil dan menengah mengalami revitalisasi, antara lain karena menjadi vendor perusahaan-perusahaan besar. Selain itu lahir dan berkembang pula usaha mikro dan rumah tangga dan sektor informal, terutama di bidang perdagangan dan jasa, di kota-kota besar, khususnya di Jakarta. Sektor ini menjadi penyerap tenaga kerja yang mengalami marginalisasi di sektor pertanian maupun industri.

Sementara itu, walaupun berperan cukup besar dalam pengumpulan bahan pangan beras dan sangat instrumental dalam pencapaian swasembada beras dan berkembang cukup pesat dari segi kuantitatif, namun sektor koperasi ini dinilai paling terbelakang dalam perkembangan perekonomian modern dan dari segi pertumbuhan ekonomi. Sungguhpun begitu, beberapa koperasi berkembang cukup signifikan dan berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di masa Orde Baru, pada pertengahan dasawarsa 70-an, masyarakat digugah kesadarannya tentang timbulnya kemiskinan, yang mengiringi pertumbuhan ekonomi. Namun dengan terbangunnya kesadaran itu, timbul upaya-upaya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, sehingga persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus menurun dari sekitar 60% pada awal dasawarsa '70-an menjadi hanya 11% pada akhir Orde Baru. Tetapi ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan itu meningkat lagi menjadi sekitar 15%, demikian pula jumlah pengangguran.

Walhasil, perekonomian Indonesia di masa Orde Baru yang bercorak kapitalis, berakhir dengan krisis ekonomi, yang diawali dengan krisis moneter. Seharusnya Pemerintah memikirkan kembali pola perkembangan ekonomi yang bercorak kapitalis. Namun yang terjadi adalah proses liberalisasi yang makin jauh dengan marginalisasi peran Negara. Malahan ekonom semacam Mubyarto dan Sri-Edi Swasono berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia telah mengikuti paradigma Neo-liberalisme yang tidak berdaya menghadapi arus globalisasi yang berintikan ekspansi kapitalis.

Dilihat dari segi kedaulatan rakyat, Indonesia mengalami kemerosotan pertama, dalam kedaulatan pangan yang ditandai oleh impor beras secara terus menerus yang menimbulkan protes dari kalangan petani, kedua dalam kedaulatan energi, menyusul berubahnya kedudukan Indonesia, sebagai negara eksportir energi menjadi net-importir energi dalam situasi meningkatnya harga energi dunia yang menyebabkan kenaikan harga BBM yang berdampak kenaikan harga umum sehingga memerosotkan tingkat kesejahteraan rakyat. Ketiga adalah krisis lingkungan hidup yang ditandai oleh kerusakan ekologi dan kelestarian sumberdaya alam, sehingga menimbulkan berbagai bencana seperti kebakaran hutan dan banjir. Terakhir adalah kemungkinan timbulnya krisis keuangan sebagai dampak krisis keuangan AS yang berdampak global itu, karena kedudukan dan peranan AS sebagai lokomotif perekonomian dunia. Kesemuanya itu mengarahkan orientasi paradigma pembangunan kepada prinsip kedaulatan rakyat di bidang pangan, energi, pengelolaan lingkungan hidup dan keuangan.

VI.

Pembentukan paradigma pembangunan yang baru perlu mempertimbangkan dua hal. Pertama, mengambil pelajaran dari keterjebakan-keterjebakan dalam kebijaksanaan pembangunan yang menjadi sumber ketergantungan dan krisis. Kedua, memilih elemen-

elemen paradigma yang telah berkembang di masa lalu yang sejalan dengan prinsip Demokrasi Ekonomi yang ditopang oleh dua prinsip, yaitu partisipasi dan emansipasi kehidupan rakyat.

Pertama adalah keterjebakan pada teori lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal, yang sampai pada kesimbulan pada perlunya meminjam dana pembangunan dari luar negeri. Pada waktu, rakyat Indonesia sebenarnya sudah mampu menghimpun dana sendiri, baik dari pajak perusahaan-perusahaan asing, maupun dana lokal dari tabungan yang dihimpun oleh lembaga perkreditan rakyat yang jumlahnya pada waktu itu sudah sekitar 3.000. Sekarang ini, di daerah yang miskin seperti Gunung Kidul pun BRI sudah mampu menghimpun modal. Dalam kasus Bangladesh, Grameen Bank mampu pula menghimpun tabungan dari orang miskin yang produktif. Lembaga perkreditan syari'ah (BMT) juga bisa berkembang pesat di seluruh tanah air dari dana sendiri. Tapi Indonesia bisa juga memperoleh hibah dari luar negeri untuk membangun lembaga perkreditan mikro.

Kedua, adalah keterjebakan dalam strategi pembangunan yang melompat, langsung berorientasi ekspor dan industri barang-barang sekunder. Menurut Samir Amin, negara-negara industri maju sekarang ini, pada awal pembangunan, memulai dengan produksi barang-barang kebutuhan massal yang menyerap tenaga kerja banyak. Setelah mencapai skala tertentu, yang diukur dengan jumlah industrinya, maka industrialisasi dilanjutkan dengan produksi barang-barang modal. Baru dalam tahap kedua, dikembangkan industri substitusi impor dan industri ekspor. Namun Indonesia melompat ke tahap kedua, sehingga Indonesia membutuhkan devisa yang besar untuk mengimpor barang-barang modal. Dari sinilah Indonesia terjebak ke dalam utang luar negeri.

Jebakan ketiga adalah penyusunan APBN yang lebih besar pasak dari tiang, yang menyebabkan Indonesia harus berutang ke luar negeri untuk menutup defisit. Karena itu maka Pemerintah harus kembali kepada pola anggaran berimbang yang murni tanpa utang. Untuk memperoleh utang, Pemerintah harus menggadaikan sumberdaya alamnya, khususnya migas. Karena itu maka terjadilah eksploitasi sumberdaya alam tanpa kendali, demi membayar utang luar negeri. Reformasi anggaran di arahkan kepada kemandirian finansial negara.

Kesalahan keempat dalam pembangunan produksi sektor pangan, semata-mata dengan peningkatan produksi, dengan memakai pupuk dan pestisida kimia yang berdampak merusak kesuburan lahan. Orientasi ini, mengakibatkan peningkatan pendapatan petani, sehingga mengurangi insentif petani untuk memproduksi. Setelah swasembada tercapai pada tahun 1985, maka tak lama kemudian Indonesia mulai lagi mengimpor beras yang berdampak merusak harga beras di tingkat petani yang lagi-lagi menurunkan pendapatan petani dan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat karena harga beras yang mahal.

Karena ketergantungan kepada produksi migas, maka Pemerintah tidak pernah memikirkan energi alternatif, yaitu bio-energi yang bahannya terdapat melimpah di Indonesia. Barangkali juga karena teknologinya belum diketahui. Namun sekarang, mau tidak mau Indonesia harus mengembangkan bio-energi bersama-sama dengan pengembangan pupuk organik. Maka kita harus mengacu kembali pada pasal 33 ayat 2 dan 3 bahwa pembangunan di Indonesia itu adalah pengembangan sumberdaya alam, sehingga secara paradigmatik, pembangunan Indonesia harus berbasis sumberdaya alam (*resource-based development*), tapi tidak semata-mata didasarkan pada prinsip keunggulan komparatif, melainkan juga keunggulan kompetitif, bertolak dari modal

intelektual, yaitu pengetahuan, teknologi dan sumberdaya manusia. Dengan perkataan lain, Indonesia perlu mengembangkan ekonomi kreatif (*creative economy*).

Biasanya modal intelektual itu dianggap sebagai padat modal. Paradigma *capital-intensive economy* perlu ditinggalkan karena basis ekonomi kita adalah usaha kecil dan menengah. Karena itu pengembangan energi, bersama-sama dengan pengembangan pangan harus didasarkan pada prinsip partisipasi dan *knowledge-extensive*, sehingga pelaksanaannya harus menyebar dalam usaha kecil dan menengah yang dikoordinasikan oleh koperasi, semacam koperasi teh di Jepang, yang industri pengolahannya dilakukan oleh koperasi. Industri semacam ini bisa pula dilakukan pada industri berbasis kelapa (*coconut based industry*) seperti di India yang bisa berorientasi ke pasar ekspor.

Pembangunan berbasis sumberdaya alam akan akan merupakan iklim yang kondusif bagi pencapaian kedaulatan pangan dan energi serta yang tak kurang pentingnya memungkinkan terciptanya kedaulatan finansial. Hanya saja, skala ekonomi petani perlu diperbesar hingga mencapai rata-rata 2 ha. per unit usaha rumah tangga. Ini perlu dilandasi dengan pembaharuan agraria (*agrarian reform*), karena pembaharuan tanah adalah jalan untuk menciptakan kedaulatan petani atas tanah yang berfungsi sosial.

Program pembangunan atas dasar partisipasi dan swadaya akan mengefisiensikan anggaran pembangunan negara. Karena itu disamping meningkatkan pajak harus pula dilakukan perampingan anggaran pengeluaran, sehingga bukan tidak mungkin diperoleh surplus dalam APBN. Hal ini juga berarti menegakkan kemandirian finansial negara. Dalam hal ini ada tiga pola negara dalam kaitannya dengan pembangunan, yaitu negara aktif (*active state*), negara liberal (*liberal state*) dan negara res publika (*republican state*). Pola pertama negara banyak melakukan regulasi, intervensi dan perencanaan. Pola kedua memberikan kebebasan kepada masyarakat dengan meminimalkan peranan negara, sedangkan pola ketiga mengarahkan fungsi negara kepada pelayanan publik yang efisien. Indonesia sudah berpengalaman dengan dua pola yang pertama, tetapi banyak menimbulkan masalah. Pola pertama, menimbulkan ketergantungan rakyat kepada negara. Pola kedua mendorong anarki ekonomi. Karena itu yang perlu dicoba adalah pola ketiga, dengan catatan pelayanan publik tidak hanya dilakukan oleh negara tetapi juga oleh masyarakat warga dan perusahaan-perusahaan melalui prinsip tanggung-jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Pola ketiga ini mendukung kedaulatan finansial negara yang sangat dibutuhkan di masa mendatang.

Jakarta, 29 Oktober 2008